

Ketidakberdayaan Institusi Sekolah dalam Penegakan Disiplin

Angri Maiwiza¹, Junaidi Junaidi^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: junaidi@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tajamnya kesenjangan antara keberadaan sistem tata tertib tertulis secara ideal dengan realitas ketidakberdayaan institusi dalam menegakkan disiplin melalui konsisten pemberian sanksi disiplin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari 8 informan meliputi 6 siswa (kategori sering melanggar dan patuh), Guru BK, dan guru piket. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, yang menyatakan bahwa kepatuhan individu terhadap aturan ditentukan oleh keberadaan ikatan sosial (*social bond*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya elemen *attachment*, *belief*, *commitment*, dan *involvement* menyebabkan siswa melakukan normalisasi terhadap pelanggaran karena menganggap aturan dapat dinegosiasikan dengan risiko minim. Ketidakberdayaan institusi ini dipicu oleh faktor internal (lemahnya konsistensi internal sekolah) dan faktor eksternal (dilema ekonomi institusi swasta dan intervensi pihak luar). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada sudut pandang ketidakberdayaan institusi secara spesifik di lingkup sekolah swasta yang memiliki dinamika kontrol sosial berbeda akibat ketergantungan finansial pada iuran siswa. Disimpulkan bahwa kegagalan disiplin di sekolah ini merupakan masalah sistematis dalam pengelolaan instrumen kekuasaan institusi.

Kata kunci: Kontrol sosial; Ketidakberdayaan institusi; Penegakan disiplin; Sekolah swasta.

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of the powerlessness of school institutions in enforcing discipline at SMAS PGRI 1 Padang, where a significant gap exists between written regulations and the reality of students' compliance. This research employed a qualitative approach with a case study design. The informants were selected using purposive sampling and consisted of eight informants, including six students (representing both frequently offending and compliant students), a guidance and counseling teacher, and a teacher on duty. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed interactively using the Miles and Huberman model, which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. This study was analyzed using Travis Hirschi's social control theory, which explains that individual compliance with rules is strongly determined by the existence of social bonds. The findings show that the weakening of the elements of attachment, belief, commitment, and involvement leads students to normalize rule violations because they perceive school regulations as negotiable and carrying minimal risk. This institutional powerlessness is triggered by internal factors (weak internal consistency within the school) and external factors (the economic dilemma of a private school and outside intervention). The novelty of this study lies in its focus on institutional powerlessness specifically within the context of a private school, which has different dynamics of social control due to its financial dependence on student fees. The study concludes that the failure of discipline enforcement in this school is a systemic problem in the management of institutional instruments of authority.

Keywords: Institutional Powerlessness, discipline enforcement, Social Control, Private school.

How to Cite: Maiwiza, A. & Junaidi, J. (2026). Ketidakberdayaan Institusi Sekolah dalam Penegakan Disiplin. *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*, 5(3), 441-451.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

Pendahuluan

Sekolah merupakan lembaga sosialisasi sekunder yang mengemban amanah fundamental untuk membentuk karakter dan kedisiplinan generasi muda di tengah arus perubahan sosial yang dinamis. Dalam menjalankan fungsinya, sekolah menetapkan berbagai instrumen kontrol sosial berupa norma akademik, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk mengatur perilaku siswa agar selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Secara sosiologis, institusi pendidikan berfungsi sebagai agen pengendalian sosial (*social control*) yang bertugas mengarahkan individu agar mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Iman, 2024). Kontrol sosial dalam konteks ini dipahami sebagai suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Suryani, 2023).

Dalam konteks pendidikan, sekolah merupakan salah satu lembaga yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial tersebut. Untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya, sekolah ini menetapkan sistem kontrol berupa tata tertib atau aturan sekolah yang sangat jelas, terperinci, dan lengkap mulai dari klasifikasi pelanggaran ringan hingga sangat berat beserta sanksinya masing-masing. Dokumen tata tertib tertulis tersebut dicantumkan secara formal dan diletakkan pada papan pengumuman sekolah sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh warga sekolah. Meskipun sekolah telah memiliki instrumen kontrol sosial yang lengkap dalam bentuk dokumen tata tertib tertulis, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam. Realitasnya, tata tertib tersebut belum sepenuhnya ditaati oleh siswa.

Data pelanggaran pada periode Juli-November 2025 yang tercatat di Buku BK menunjukkan frekuensi pelanggaran yang mengkhawatirkan. Otoritas kelembagaan sekolah tampak mengalami degradasi serius akibat tidak mampunya instrumen kontrol tersebut menekan angka pelanggaran. Meskipun sekolah telah memiliki instrumen kontrol sosial yang lengkap dalam bentuk dokumen tata tertib tertulis, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam. Realitasnya, tata tertib tersebut belum sepenuhnya ditaati oleh siswa. Data pelanggaran pada periode Juli-November 2025 yang tercatat di Buku BK menunjukkan frekuensi pelanggaran yang mengkhawatirkan. Otoritas kelembagaan sekolah tampak mengalami degradasi serius akibat tidak mampunya instrumen kontrol tersebut menekan angka pelanggaran.

Berdasarkan catatan resmi buku BK tahun 2025, kegagalan instrumen kontrol ini tercermin dari maraknya akumulasi pelanggaran siswa yang mencakup berbagai tingkatan sanksi. Pada kategori pelanggaran ringan dan sedang, kedisiplinan harian tampak lumpuh dengan adanya puluhan siswa yang terlibat perilaku tidak sopan kepada guru, rutinitas pelanggaran merokok di lingkungan sekolah, serta tingginya angka keterlambatan dan aksi bolos saat jam pelajaran berlangsung. Ironisnya, degradasi kontrol sosial ini tidak hanya berhenti pada tata krama harian, melainkan telah meluas pada kategor pelanggaran sangat berat yang mengarah pada kriminal dan fisik, seperti kasus siswa yang terbukti merusak dan mencuri fasilitas AC sekolah, hingga tindakan melanggar hukum berupa pelemparan kaca kepada adek kelas.

Data pelanggaran diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal dengan praktik penegakan disiplin di sekolah. Dalam konteks pendidikan, disiplin seharusnya terbentuk melalui pembiasaan perilaku taat, tertib, dan bertanggung jawab terhadap aturan yang berlaku (Momonto et al., 2023). Akan tetapi, apabila pelanggaran terus berulang dan sanksi tidak menimbulkan efek jera, maka tata tertib kehilangan fungsi sebagai alat pengendalian perilaku. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Rahmayana et al. (2023) bahwa ketidakberdayaan institusi sekolah tampak ketika mekanisme formal seperti aturan, pengawasan, dan sanksi tidak mampu menghasilkan perubahan perilaku siswa secara berkelanjutan. Dengan kata lain, masalah disiplin tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan kenakalan individual siswa, tetapi juga sebagai gejala melemahnya fungsi kontrol sosial institusi sekolah. Dengan kata lain, masalah disiplin tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan kenakalan individual siswa, tetapi juga sebagai gejala melemahnya fungsi kontrol sosial institusi sekolah. Kondisi ini mempertegas kajian kelembagaan dari Mustakar et al. (2024) mengenai pentingnya efektivitas sanksi sekolah dalam menanggulangi pelanggaran tata tertib.

Temuan awal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian siswa tidak lagi merasa takut atau jera terhadap teguran guru karena melihat sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan tata tertib tertulis. Beberapa siswa bahkan menilai bahwa banyaknya aturan tidak berbanding lurus dengan konsistensi pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kewibawaan sekolah sebagai lembaga kontrol sosial mulai mengalami pelemahan. Ketika siswa memandang bahwa pelanggaran dapat dinegosiasikan, sanksi tidak pasti, dan aturan tidak diterapkan secara adil, maka muncul kecenderungan untuk menormalisasi perilaku menyimpang. Pada titik ini, ketidakdisiplinan tidak lagi cukup dibaca sebagai tindakan individual, melainkan sebagai akibat dari melemahnya legitimasi sekolah sebagai institusi pengendali perilaku.

Selain data kuantitatif dari buku BK, hasil wawancara mendalam dengan wali kelas juga mengonfirmasi adanya degradasi moral seperti berkata kasar kepada guru dan kedisiplinan yang signifikan, khususnya dalam penggunaan tata krama berbicara yang kasar oleh siswa kepada sesama teman maupun

kepada guru. Tingginya angka pelanggaran ini mengindikasikan bahwa aturan tertulis tidak serta-merta menjamin kepatuhan jika tidak dibarengi dengan penegakan sanksi yang kuat dari institusi. Dampaknya, pelaksanaan sanksi yang inkonsisten ini melumpuhkan ketakutan siswa akan konsekuensi pelanggaran, sehingga aturan cenderung diabaikan. Dinamika penegakan ini sejalan dengan studi [Dewi et al. \(2025\)](#) mengenai implementasi tata tertib terhadap pembentukan karakter disiplin yang berfokus pada upaya sekolah dan studi [Putra \(2023\)](#) yang menyoroti manajemen peserta didik dalam penegakan disiplin.

Fenomena ketidakberdayaan institusi sekolah ini kian nyata di lapangan ketika penegakan sanksi tidak dijalankan secara konsisten sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari pengakuan objektif situasi sekolah di mana kuantitas aturan melimpah namun eksekusinya tidak sesuai aturan tertulis. Ketika aturan dilanggar secara berulang tanpa sanksi konkret, wibawa aturan sebagai pedoman formal sekolah runtuh. Dampaknya, pelaksanaan sanksi yang inkonsisten ini melumpuhkan ketakutan siswa akan konsekuensi pelanggaran, sehingga aturan cenderung diabaikan secara massal.

Menurut [Hirschi \(1969\)](#) teori kontrol sosial menjelaskan bahwa individu cenderung mematuhi aturan apabila memiliki ikatan sosial yang kuat dengan lembaga sosial di sekitarnya. Sebaliknya, perilaku menyimpang lebih mudah terjadi ketika ikatan sosial tersebut melemah ([Situmeang, 2021](#)). Hirschi mengemukakan empat unsur ikatan sosial, yaitu attachment atau kelekatan, commitment atau komitmen, involvement atau keterlibatan, dan belief atau kepercayaan ([Dulkhiah, 2020](#)). Apabila sekolah tidak berdaya yang terlihat dari tidak konsisten dalam menegakkan sanksi, maka unsur ikatan sosial Travis Hirschi dapat melemah karena siswa tidak lagi memandang guru dan aturan sekolah sebagai otoritas kuat.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus pengkajian yang secara spesifik membedakan fenomena ketidakberdayaan institusi dalam penegakan disiplin di tingkat SMA Swasta. Sekolah swasta memiliki karakteristik unik, di mana sistem kontrol sosialnya berkelindan erat dengan ketergantungan finansial lembaga pada siswa. Penelitian ini tidak memandang pelanggaran disiplin semata-mata sebagai perilaku individual siswa yang kurang patuh, melainkan sebagai gejala melemahnya kontrol sosial institusi sekolah swasta. Novelty ini mempertegas bahwa ketidakberdayaan sekolah bukan sekadar masalah teknis pemberian hukuman, melainkan persoalan institusional yang berkaitan dengan legitimasi, konsistensi, dan daya ikat aturan sekolah. Penelitian ini menjadi sangat krusial untuk mengungkap bentuk-bentuk ketidakberdayaan sekolah dalam penegakan disiplin dan faktor-faktor struktural serta sosial apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidakberdayaan institusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ketidakberdayaan institusi sekolah dan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya ketidakberdayaan dalam penegakan disiplin.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus yang berupaya menyajikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata ([Sugiyono, 2013](#)). Tipe studi kasus digunakan karena fenomena yang dikaji bersifat kontekstual, spesifik, dan terjadi dalam lingkungan sosial tertentu, yaitu sekolah swasta yang memiliki dinamika kelembagaan, hubungan antara guru, siswa, kepala sekolah, dan yayasan, serta persoalan penegakan disiplin yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi institusional sekolah. Penelitian ini dilakukan di sekolah swasta dengan pemilihan lokasinya karena beberapa hal pertama sekolah ini memiliki tata tertib tertulis yang memuat klasifikasi pelanggaran dan sanksi, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara aturan tertulis dengan pelaksanaan sanksi di lapangan. Kedua, data awal menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran disiplin siswa, mulai dari keterlambatan, cabut saat jam pelajaran, merokok, berkata tidak sopan kepada guru, hingga pelanggaran berat seperti perusakan dan pencurian fasilitas sekolah.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang kompeten dalam hal data atau informasi tertentu ([Sugiyono, 2013](#)). Kriteria informan ditentukan berdasarkan keterlibatan langsung, pengetahuan, dan pengalaman informan terhadap praktik penegakan disiplin di sekolah. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang, terdiri atas 6 siswa, 1 guru bimbingan konseling, 1 guru piket. Adapun kriteria siswa sebagai informan meliputi: siswa yang pernah melakukan pelanggaran disiplin, siswa yang tergolong patuh terhadap tata tertib, siswa dari tingkat kelas yang berbeda, serta siswa yang mengetahui atau pernah menyaksikan langsung proses pemberian sanksi di sekolah. Guru BK dipilih karena memiliki data dan pengalaman langsung dalam menangani pelanggaran siswa. Guru piket dipilih karena berperan dalam pengawasan harian serta mengetahui perilaku siswa di lingkungan sekolah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun

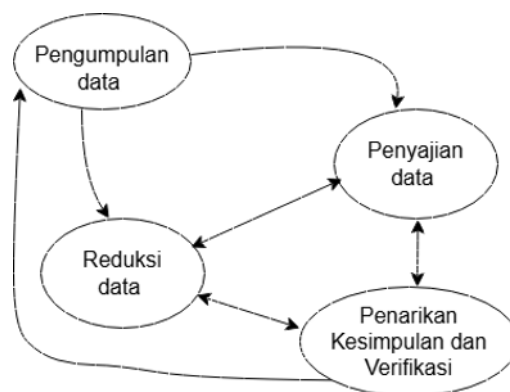
berdasarkan fokus penelitian (Sugiyono, 2013). Prosedur wawancara diawali dengan menentukan informan sesuai kriteria, menjelaskan tujuan penelitian kepada informan, meminta kesediaan informan untuk diwawancarai, kemudian melakukan wawancara secara langsung di lingkungan sekolah pada waktu yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Wawancara dengan siswa diarahkan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan tata tertib, konsistensi sanksi, pengalaman melihat atau mengalami pelanggaran, serta pandangan mereka terhadap kewibawaan sekolah. Wawancara dengan guru BK, guru piket diarahkan untuk memperoleh informasi tentang bentuk pelanggaran, mekanisme penanganan siswa, kendala pemberian sanksi, konsistensi pelaksanaan tata tertib dan untuk memahami kebijakan institusi.

Observasi dilakukan secara nonpartisipatif, yaitu peneliti mengamati situasi dan perilaku di lingkungan sekolah tanpa terlibat langsung dalam aktivitas warga sekolah (Syamsuddin, 2023). Observasi difokuskan pada beberapa aspek operasional, yaitu: bentuk pelanggaran disiplin yang terjadi di sekolah, respons guru terhadap pelanggaran, penerapan sanksi terhadap siswa yang melanggar, interaksi antara siswa dan guru, kepatuhan siswa terhadap tata tertib, serta kondisi lingkungan sekolah yang berkaitan dengan pengawasan disiplin. Observasi juga dilakukan terhadap ruang-ruang yang berkaitan dengan aktivitas siswa, seperti gerbang sekolah, ruang kelas, halaman sekolah, ruang guru, dan area yang sering menjadi tempat terjadinya pelanggaran.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi (Sugiyono, 2013). Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini difokuskan pada dokumen yang berkaitan langsung dengan disiplin sekolah, seperti dokumen tata tertib siswa, buku catatan pelanggaran siswa, data pelanggaran dari guru BK, daftar sanksi berdasarkan kategori pelanggaran, dokumentasi papan tata tertib sekolah, serta foto kondisi lingkungan sekolah yang relevan dengan praktik penegakan disiplin. Dokumentasi ini penting untuk melihat kesesuaian antara aturan formal yang tertulis dengan praktik penegakan sanksi di lapangan.

Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik Miles & Huberman (2014). Triangulasi sumber berarti membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari siswa, guru BK, guru piket/wali kelas, wakil kurikulum sekolah. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan hasil dokumentasi, wawancara dan observasi untuk menemukan sebuah kesimpulan. Sebagai contoh, pernyataan informan tentang pelanggaran merokok, keterlambatan, cabut saat jam pelajaran, atau tindakan tidak sopan kepada guru dibandingkan dengan catatan pelanggaran dari guru BK dan hasil observasi peneliti di lingkungan sekolah. Dengan cara ini, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif dari Miles dan Huberman, terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Berikut adalah komponen analisis data interaktif Miles dan Huberman;



Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data (Interaktif Model)

Sumber: Sugiyono (2013)

Reduksi data diartikan sebagai membuang hal-hal yang dianggap tidak diperlukan dan memfokuskan pada hal-hal penting (Syamsuddin, 2023). Pengumpulan data observasi dengan mengamati langsung aktivitas di sekolah, wawancara dengan pihak yang dirasa memiliki kriteria kunci dalam mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan penelitian ini, seperti siswa siswi, guru Bk dan guru piket, dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto sebagai bukti pendukung hasil dari data yang dilakukan di lapangan seperti ambil foto terkait aturan yang berlaku di sekolah, video lingkungan sekolah dan merekam suara hasil wawancara dengan informan. Reduksi data dengan memilah dan mengelompokan hasil data yang penting,

penyajian data menjadi satu kesatuan yang tersusun secara kompleks, dan penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir.

Analisis data dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi, khususnya konsep ikatan sosial yang terdiri atas attachment, commitment, involvement, dan belief. Teori ini digunakan untuk membaca bagaimana ketidakkonsistenan penegakan sanksi dapat melemahkan hubungan siswa dengan institusi sekolah. Unsur attachment digunakan untuk melihat melemahnya rasa hormat dan kedekatan siswa terhadap guru serta pihak sekolah. Unsur commitment digunakan untuk memahami bagaimana siswa menilai risiko pelanggaran terhadap masa depan dan status mereka sebagai peserta didik. Unsur involvement digunakan untuk melihat keterlibatan siswa dalam aktivitas sekolah yang dapat mencegah atau justru membuka peluang pelanggaran. Sementara itu, unsur belief digunakan untuk menganalisis kepercayaan siswa terhadap keadilan, ketegasan, dan konsistensi tata tertib sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan kunci, berikut uraian mengenai ketidakberdayaan institusi sekolah dalam penegakan disiplin. Hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin siswa masih tampak dalam aktivitas sehari-hari sekolah. Pada jam kedatangan siswa, peneliti menemukan beberapa siswa datang terlambat setelah kegiatan sekolah dimulai. Siswa yang terlambat tetap diperbolehkan masuk ke lingkungan sekolah dan mengikuti pembelajaran setelah mendapatkan teguran lisan dari guru piket. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran keterlambatan memang mendapat respons dari pihak sekolah, tetapi respons tersebut belum sepenuhnya menunjukkan penerapan sanksi sebagaimana yang tertulis dalam tata tertib sekolah. Kondisi ini memperkuat data wawancara siswa yang menyatakan bahwa keterlambatan merupakan salah satu pelanggaran yang sering terjadi dan tidak selalu diikuti dengan sanksi yang tegas.

Selain keterlambatan, hasil observasi juga menunjukkan adanya siswa yang tidak mengikuti pembelajaran secara tertib, seperti berada di luar kelas pada jam pelajaran, duduk di area tertentu saat kegiatan belajar berlangsung, serta kurang merespons teguran guru secara serius. Dalam beberapa kesempatan, teguran yang diberikan guru lebih bersifat lisan dan situasional, sehingga siswa masih memiliki peluang untuk mengulangi pelanggaran yang sama. Temuan observasi ini memperlihatkan adanya jarak antara aturan formal yang terpampang pada papan tata tertib dengan praktik penegakan sanksi di lapangan. Dengan demikian, data observasi mendukung temuan wawancara bahwa sebagian siswa memandang aturan sekolah belum diterapkan secara konsisten.

Bentuk Ketidakberdayaan Institusi Dalam Penegakan Disiplin

Berdasarkan temuan di lapangan, ketidakberdayaan institusi dalam menegakkan disiplin mewujudkan dalam beberapa bentuk konkret, yaitu:

Ketidaksesuaian Simbol Aturan dengan Realitas di Lapangan

Terdapat ketidaksesuaian antara ancaman sanksi dalam dokumen tata tertib dengan realitas penegakannya sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi pada jam kedatangan siswa, peneliti menemukan bahwa keterlambatan masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang tampak secara langsung. Beberapa siswa datang setelah waktu masuk sekolah, kemudian mendapatkan teguran lisan dari guru piket dan tetap diperbolehkan masuk kelas. Situasi ini menjadi stimulus yang mudah diamati oleh siswa lain karena terjadi di ruang terbuka, yaitu area gerbang dan halaman sekolah. Seorang siswa kelas X (DV) menyatakan, sebagai berikut:

“Menurut saya, sebanyak apa pun peraturan yang dibuat, kalau penerapannya nggak sesuai ya hasilnya sama saja, Buk. Murid jadi nggak akan taat karena kami sudah nggak percaya lagi sama ketegasan sanksinya. Contohnya saya sendiri, saya pernah jadi korban waktu kakak kelas melempar kaca sampai paha saya robek. Harusnya kalau di aturan itu dia dikeluarkan, tapi kenyataannya dia tetap sekolah di sini. Jadi seolah-olah aturan itu nggak ada gunanya” (Wawancara, 2 Februari 2026).

Informasi yang serupa juga diberikan oleh siswi (AZ) kelas XII IPS mengenai pelanggaran harian siswa, seperti pernyataannya berikut:

“Walaupun tata tertib sudah terpampang di depan tapi masih banyak teman-teman yang melanggar pelanggaran ringan buk seperti telat datang sekolah, tidak ikut upacara, merokok di lingkungan sekolah, berkata kasar kepada guru atau ke teman tiap hari. Sanksi yang diberikan guru kepada mereka yang melakukan pelanggaran ini tidak sering tidak sesuai dengan yang ada di papan tata tertib siswa buk” (Wawancara, 4 Februari 2026).

Informasi yang serupa juga diberikan oleh siswa kelas XII IPS (ALV), dia mengatakan:

“Pelanggaran aturan yang dilakukan siswa disekolah sudah termasuk banyak dan sering terjadi. Pihak sekolah seringkali nggak kasih hukuman yang sesuai sama aturan tertulis buk, jadi kami agak hilang kepercayaan sama ketegasan sekolah buk. Sepertinya sekolah takut bertindak tegas karena keuangan sekolah kan bergantung banget sama jumlah siswanya” (Wawancara, 28 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk ketidakberdayaan pertama institusi sekolah mawujud pada diskrepansi kronis antara regulasi tertulis dengan eksekusi nyata di lapangan. Ketidakberdayaan ini terindikasi dari pembiaran pelanggaran harian (seperti keterlambatan dan merokok) serta tidak diterapkan sanksi drop-out pada pelanggaran sangat berat. Dampak ketidaksesuaian ini, runtuhnya legitimasi aturan tertulis dimata siswa, mereka kehilangan kepercayaan terhadap otoritas hukum sekolah dan memandang tata tertib tidak lebih dari sekedar formalitas.

Normalisasi Pelanggaran

Ketidakberdayaan institusi berujung pada normalisasi perilaku menyimpang. Ketika sanksi tidak memiliki kekuatan mengikat, siswa cenderung mengabaikan otoritas guru. Seorang siswa kelas XI IPA (HK) mengetahui pelanggaran harian siswa dan penegakan sanksi seperti pernyataannya berikut:

“Peraturan yang sering dilanggar siswa di sekolah ini seperti telat datang sekolah/terlambat, cabut saat jam pelajaran, merokok di lingkungan sekolah atau pergi keluar sekolah dan masih jam pelajaran, berkata kasar, tidur di kelas, melawan kepada guru bahkan guru juga sering negur tapi tidak didengarkan lagi sama mereka buk” (Wawancara, 28 Januari 2026)

Hal serupa juga diungkapkan oleh (ALV) siswa kelas XII IPS mengetahui pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar aturan, sebagai berikut:

“Pihak sekolah seringkali nggak kasih hukuman yang sesuai sama aturan tertulis buk, jadi kami agak hilang kepercayaan sama ketegasan sekolah buk Sepertinya sekolah takut bertindak tegas karena keuangan sekolah kan bergantung banget sama jumlah siswanya. Jadi dengan adanya sanksi yang berat di aturan tidak membuat jera siswa disini untuk melanggar aturannya buk” (Wawancara, 28 Januari 2026)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, ketidakberdayaan kedua mawujud sebagai normalisasi melakukan pelanggaran. Akibat sanksi yang longgar dan teguran lisan yang repetitif tanpa tindakan konkret, siswa memahami bahwa melanggar aturan merupakan tindakan yang aman dan minim risiko. Aktivitas menyimpang seperti cabut, tidur di kelas, dan merokok akhirnya bergeser dari tindakan tabu menjadi habituasi harian yang dianggap lumrah karena siswa membaca adanya ruang negosiasi dan kompromi dari pihak institusi.

Luntunya Kewibawaan Pegawai Sekolah

Ketidakberdayaan institusi mengakibatkan hilangnya rasa segan siswa terhadap tenaga pendidik. Observasi menunjukkan adanya resistensi verbal dari siswa saat ditegur. Seorang siswi kelas XI IPA (AGL) dalam wawancara menyampaikan, sebagai berikut:

“Banyaknya teman-teman yang tidak takut dengan guru bahkan dengan kepala sekolah itu dipengaruhi juga sama ketegasan mereka, jika pihak sekolah masih mentolerir mereka akan semakin menjadi-jadi. Biasanya siswa disekolah pada suka cari perhatian sama guru dengan berperilaku baik tetapi disini tidak berlaku seperti itu buk malah sebaliknya mereka tidak segan-segan melawan kepada guru atau mengabaikan teguran dari guru” (Wawancara, 2 Februari 2026)

Selanjutnya, informan yang bernama DV juga mengungkapkan hal serupa, sebagai berikut:

“Menurut saya, sebanyak apa pun peraturan yang dibuat kalau penerapannya nggak sesuai ya hasilnya sama saja. Siswa jadinya nggak akan patuh karena mereka sudah nggak percaya lagi sama ketegasan sanksi dari peraturan yang mereka langgar tersebut. Contohnya saya sendiri, saya pernah jadi korban waktu kakak kelas melempar kaca sampai paha saya luka. Harusnya kalau di aturan itu dia dikeluarkan, tapi kenyataannya dia tetap sekolah di sini. Jadi seolah-olah aturan itu nggak ada gunanya” (Wawancara, 2 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk ketidakberdayaan sekolah dalam menegakkan disiplin terlihat dari hilangnya rasa takut dan hormat siswa terhadap institusi dan tenaga pendidik disekolah seperti berkata kasar, tidak mendengarkan teguran dan melawan kepada guru di sekolah.

Toleransi yang berlebihan dari institusi menstimulus lahirnya resistensi verbal dan hilangnya rasa segan siswa saat ditegur.

Faktor-Faktor Penyebab Ketidakberdayaan Penegakan Sanksi

Ketidakberdayaan institusi di sekolah swasta dalam penelitian ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan, sebagai berikut:

Faktor Internal

Lemahnya konsistensi penegakan disiplin internal sekolah

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan sekolah dalam menegakkan disiplin adalah tidak konsistennya sekolah dalam penerapan aturan tertulis dan penegakannya di lapangan. Seorang siswa kelas X (DV) mengetahui bahwa sekolah tidak konsisten dalam menerapkan aturan tertulis yang ada dilapangan, seperti pernyataannya berikut:

“Menurut saya, sebanyak apa pun peraturan yang dibuat kalau penerapannya nggak sesuai ya hasilnya sama saja. Siswa jadinya nggak akan patuh karena mereka sudah nggak percaya lagi sama ketegasan sanksi dari peraturan yang mereka langgar tersebut. Contohnya saya sendiri, saya pernah jadi korban waktu kakak kelas melempar kaca sampai paha saya luka. Harusnya kalau di aturan itu dia dikeluarkan, tapi kenyataannya dia tetap sekolah di sini. Jadi seolah-olah aturan itu nggak ada gunanya” (Wawancara, 2 Februari 2026).

Informasi yang serupa juga peneliti dapatkan dari siswa kelas XII (ALV) mengenai penerapan sanksi dan dampaknya terhadap siswa, seperti pernyataannya berikut ini:

“Pemandangan siswa yang melakukan pelanggaran aturan sekolah sudah hal biasa yang kita lihat sehari-hari buk. Pihak sekolah tidak memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada itu bisa membuat kami tidak percaya lagi dengan kekuatan atau wewenang sekolah dalam menghukum kami buk. Jadi dengan adanya sanksi yang berat di aturan tidak membuat jera siswa disini untuk melanggar aturannya buk” (Wawancara, 28 Januari 2026).

Hasil observasi peneliti juga memperlihatkan bahwa penegakan sanksi terhadap pelanggaran ringan, seperti keterlambatan dan ketidaktertiban mengikuti pembelajaran, lebih sering dilakukan melalui teguran lisan. Teguran tersebut menunjukkan bahwa sekolah tetap melakukan kontrol terhadap perilaku siswa, tetapi kontrol tersebut belum selalu diikuti dengan sanksi tertulis atau tindakan disiplin sesuai klasifikasi pelanggaran dalam tata tertib. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa siswa menilai aturan sekolah belum memiliki daya paksa yang kuat. Dokumentasi papan tata tertib sekolah menunjukkan bahwa aturan dan sanksi sebenarnya telah tersedia secara formal, namun praktik observasi memperlihatkan bahwa pelaksanaannya masih bergantung pada situasi dan pertimbangan pihak sekolah.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa lemahnya komitmen konsistensi penegakan aturan dalam tubuh sekolah sendiri menjadi penyebab utama terjadinya ketidakberdayaan. Institusi cenderung mereduksi sanksi formal yang tertulis menjadi sekedar teguran lisan situasional. Ketidakasamaan parameter tindakan antar pegawai sekolah dalam mengeksekusi aturan menciptakan celah bagi siswa untuk mengabaikan sanksi, yang pada akhirnya mematikan efektivitas tata tertib dari sistem kelembagaan.

Faktor Eksternal

Dilema ekonomi institusi swasta

Sebagai sekolah swasta dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, operasional sekolah sangat bergantung pada iuran siswa. Hal ini menciptakan dilema antara menegakkan disiplin dan mempertahankan murid. Seorang siswa kelas XII IPS (ALV) memberikan pandangan mengenai penyebab sekolah tidak menerapkan sanksi yang sesuai aturan tertulis, seperti pernyataannya berikut:

“Sepertinya sekolah takut bertindak tegas karena keuangan sekolah kan bergantung banget sama jumlah siswa, jika diterapkan penegakan sanksi yang sesuai banyak murid yang harus dikeluarkan buk karena ada yang sudah masuk kategori pelanggaran sangat berat buk, Jadi dengan adanya sanksi yang berat di aturan tidak membuat jera siswa disini untuk melanggar aturannya buk” (Wawancara, 28 Januari 2026).

Informasi yang serupa juga peneliti dapatkan dari informan PS sebagai guru BK di sekolah, dia mengatakan:

"Kendala sekolah dalam menerapkan sanksi yang sesuai yaitu karena siswa di sini sedikit dan kalau harus dikeluarkan dari sekolah nanti tidak ada murid lagi, apalagi sebagai sekolah swasta kita sangat bergantung pada iuran bulanan siswa untuk membiayai operasional dan gaji guru,

sehingga ada dilema bagi pihak sekolah dalam menegakkan disiplin secara kaku" (Wawancara, 30 Januari 2026).

Berdasarkan pemaparan informan siswa dan guru BK di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal kedua adalah adanya interdependensi finansial institusi swasta terhadap iuran komite siswa. Kelangsungan operasional sekolah yang bergantung pada kuantitas murid memicu ketakutan struktural: jika sanksi drop-out ditegakkan secara rigid sesuai aturan, sekolah terancam kehilangan murid dan sumber dana. Dilema antara pemenuhan kebutuhan ekonomi lembaga dan penegakan hukum ini memaksa sekolah mengambil sikap permisif, yang mengorbankan ketegasan tata tertib demi mempertahankan stabilitas finansial yayasan.

Intervensi pihak yayasan dan Orang Tua

Penegakan disiplin di SMAS PGRI 1 Padang tidak lagi menjadi otoritas penuh tenaga pendidik seperti guru BK dan guru piket, terdapat pengaruh signifikan dari kebijakan yayasan dan tekanan dari orang tua siswa yang memiliki posisi sosial ekonomi kuat. Guru piket sekaligus wali kelas XI IPA (VN) mengetahui sistematis pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan, seperti pernyataannya berikut:

"Bagi siswa siswi yang melanggar peraturan sekolah itu akan ditangani oleh guru piket dulu sebenarnya baru ke guru Bk tetapi untuk pemberian hukuman jika sudah berat itu kita berikan ke pihak BK dan sekolah bahkan kadang-kadang yayasan juga ikut andil dalam mengambil keputusannya, apalagi kalau yang orang tuanya berada" (Wawancara, 29 Januari 2026).

Informasi serupa juga peneliti dapatkan dari siswa kelas XII IPS (ALV) mengenai penyebab penerapan sanksi pelanggaran siswa di sekolah, seperti pernyataannya:

"Pemandangan siswa yang melakukan pelanggaran aturan sekolah sudah hal biasa yang kita lihat sehari-hari buk. Kadang sekolah segan menindak tegas kalau orang tuanya punya pengaruh atau menyumbang banyak ke sekolah buk, jadi aturannya seolah-olah bisa tawar-menawar kalau ada campur tangan dari luar atau yayasan, dengan adanya sanksi yang berat di aturan tidak membuat jera siswa disini untuk melanggar aturannya buk" (Wawancara, 28 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya intervensi dari pihak yayasan atau orang tua dalam menerapkan aturan yang benar disekolah itu seringkali melunakkan sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada yang melanggar yang pada akhirnya menurunkan objektivitas sekolah dalam menegakkan keadilan di lingkungan pendidikan. Guru BK dan guru piket mengalami kelumpuhan wewenang karena adanya koersi struktural dari pengurus yayasan serta tekanan dari orang tua siswa yang berlatar belakang ekonomi kuat. Campur tangan ini membuahakan kompromi hukum atau praktik "tawar-menawar sanksi" yang subjektif, yang pada akhirnya melunakkan hukuman dan mereduksi objektivitas penegakan keadilan hukum di sekolah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberdayaan institusi sekolah dalam penegakan disiplin terwujud dalam 3 hal yaitu ketidaksesuaian aturan tertulis dengan penerapannya di lapangan, normalisasi pelanggaran dan luntarnya kewibawaan pegawai sekolah. Adapun faktor penyebab terjadinya ketidakberdayaan yaitu ada aktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu lemahnya konsistensi penegakan disiplin internal sekolah dan faktor eksternal yaitu dilema ekonomi sekolah swasta dan intervensi yayasan dan orang tua. Sekolah sebenarnya telah memiliki perangkat kontrol sosial berupa tata tertib tertulis yang memuat klasifikasi pelanggaran, mulai dari pelanggaran sangat ringan hingga sangat berat, beserta bentuk sanksinya. Namun, keberadaan aturan tertulis tersebut belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan siswa karena penerapannya dipersepsikan tidak konsisten. Hal ini terlihat dari data pelanggaran Juli–November 2025, seperti 8 siswa terlibat kasus merusak dan mencuri AC, 20 siswa merokok di lingkungan sekolah, 40 siswa tidak sopan kepada guru, 10 siswa terlambat setiap hari, serta beberapa kasus lain seperti cabut saat jam pelajaran, memanjat dinding sekolah, membully teman, dan melempar kaca kepada adik kelas. Data ini menunjukkan bahwa masalah disiplin tidak hanya muncul dalam bentuk pelanggaran ringan, tetapi juga menyentuh pelanggaran sedang, berat, bahkan sangat berat.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi. Hirschi menjelaskan bahwa kepatuhan individu terhadap norma sangat dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya ikatan sosial yang terdiri dari empat unsur, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief (Wijanarko & Eleanor, 2022). Dalam konteks penelitian ini, ketidakkonsistenan penegakan sanksi tidak hanya berdampak pada melemahnya rasa takut siswa terhadap hukuman, tetapi juga memengaruhi kualitas ikatan sosial siswa dengan sekolah sebagai institusi pengendali perilaku.

Unsur attachment atau kelekatan menjadi salah satu aspek yang paling terdampak dalam temuan penelitian ini. Attachment dalam konteks sekolah tercermin dari hubungan emosional siswa dengan guru dan institusi sekolah yang melahirkan rasa segan, hormat, dan keinginan untuk mematuhi aturan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kelekatan tersebut mengalami pelemahan ketika teguran guru tidak selalu diikuti oleh sanksi yang konsisten. Data menunjukkan bahwa banyak siswa tidak takut kepada guru bahkan kepada kepala sekolah karena pihak sekolah dinilai masih sering memberi toleransi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa otoritas guru sebagai figur kontrol sosial melemah ketika tidak didukung oleh tindakan institusional yang tegas dan konsisten. Kondisi ini memperlemah kelekatan siswa terhadap sekolah dan menghilangkan rasa takut untuk melanggar aturan, sebagaimana dijelaskan oleh Hirschi bahwa lemahnya attachment akan menurunkan kepatuhan individu terhadap norma (Wijanarko & Eleanora 2022). Hal ini selaras dengan studi Rahmadani (2021) yang menemukan bahwa sanksi yang tidak tegas gagal menimbulkan efek jera, sehingga siswa cenderung mengabaikan otoritas sekolah karena tidak adanya konsekuensi nyata yang mereka takutkan.

Selain attachment, unsur belief atau kepercayaan terhadap legitimasi aturan dan sanksi juga mengalami pelemahan yang signifikan (Situmeang, 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa tidak lagi meyakini bahwa tata tertib sekolah bersifat adil, konsisten, dan layak untuk ditaati. Ketika siswa menyaksikan pelanggaran berat tidak ditindak sesuai aturan tertulis, kepercayaan terhadap sistem disiplin sekolah menurun. Data menunjukkan bahwa contoh konkret ketika ia menjadi korban pelemparan kaca oleh kakak kelas hingga mengalami luka di paha. Menurut DV, berdasarkan aturan, pelaku semestinya mendapatkan sanksi berat, tetapi kenyataannya tetap bersekolah. Pengalaman seperti ini membuat siswa menilai bahwa aturan “seolah-olah tidak ada gunanya”. Pernyataan ini menjadi data penting karena menunjukkan bahwa lemahnya belief bukan muncul dari ketidaktautan siswa terhadap aturan, melainkan dari pengalaman melihat aturan tidak dijalankan sesuai ketentuan. Dengan demikian, klaim bahwa sekolah mengalami “disfungsi kontrol sosial” sebaiknya dimaknai secara terbatas, yaitu sebagai pelemahan fungsi kontrol sosial dalam aspek konsistensi sanksi, bukan kegagalan total seluruh fungsi sekolah. Hal ini sejalan dengan pandangan Hirschi yang menyatakan bahwa ketika individu tidak lagi percaya pada keabsahan norma dan sanksi, maka norma tersebut kehilangan daya ikat sosialnya (Suryani, 2023). Fenomena ini mengonfirmasi argumen Mustakar (2024) bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada bagaimana instrumen tersebut dikelola secara konsisten sebagai bagian dari permasalahan institusional.

Unsur commitment atau komitmen perlu dilihat dari cara siswa menimbang risiko pelanggaran terhadap masa depan, reputasi, dan status mereka sebagai peserta didik. Dalam teori Hirschi, individu yang memiliki komitmen kuat terhadap tujuan konvensional, seperti prestasi, kelulusan, dan masa depan pendidikan, akan lebih berhati-hati melakukan pelanggaran karena khawatir kehilangan sesuatu yang bernilai (Suryani, 2023). Pada kasus di lapangan, ketidakkonsistenan sanksi membuat sebagian siswa memandang pelanggaran sebagai tindakan dengan risiko yang relatif rendah.

Unsur involvement atau keterlibatan juga relevan untuk menjelaskan mengapa pelanggaran dapat terjadi berulang. Involvement dalam teori Hirschi mengacu pada keterlibatan individu dalam aktivitas positif dan konvensional, seperti kegiatan belajar, organisasi sekolah, ekstrakurikuler, atau aktivitas lain yang mengurangi peluang melakukan penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan adanya pelanggaran seperti tidur di kelas saat pembelajaran, cabut pada jam pelajaran, tidak mengikuti upacara, serta tidak mengikuti pelajaran secara tertib. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian siswa tidak sepenuhnya terikat dalam aktivitas sekolah yang seharusnya mengarahkan waktu dan energi mereka pada kegiatan positif. Dengan demikian, lemahnya involvement bukan hanya masalah kurangnya kegiatan, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya daya ikat kegiatan sekolah terhadap siswa.

Lebih lanjut, faktor-faktor penyebab ketidakkonsistenan penegakan sanksi yang ditemukan dalam penelitian ini seperti faktor internal yaitu lemahnya konsistensi penegakan disiplin internal sekolah dan faktor eksternalnya yaitu dilema ekonomi sekolah swasta, intervensi pihak yayasan dan orang tua memperkuat pemahaman bahwa ketidakberdayaan institusi sekolah merupakan fenomena struktural, bukan sekadar kegagalan individu guru. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa ketidakberdayaan institusi merupakan hasil dari interaksi antara aturan, aktor, dan praktik sosial yang berlangsung dalam suatu lembaga pendidikan (Iman, 2024). Ketika struktur kelembagaan tidak mendukung penegakan disiplin yang tegas dan adil, maka fungsi kontrol sosial sekolah akan melemah secara sistemik (Dulkiah, 2020).

Berdasarkan analisis tersebut, temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara ketidakberdayaan institusi melalui ketidaksesuaian aturan tertulis dengan penerapan sanksi di lapangan, normalisasi pelanggaran dan lunturnya kewibawaan pegawai sekolah. Namun, hubungan tersebut tidak perlu dinyatakan secara berlebihan sebagai proses yang “secara otomatis” menurunkan kedisiplinan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori kontrol sosial dalam konteks sosiologi pendidikan, khususnya pada sekolah swasta. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori Hirschi tidak hanya dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku menyimpang individu, tetapi juga dapat dipakai untuk

memahami bagaimana praktik kelembagaan membentuk kuat atau lemahnya ikatan sosial siswa dengan sekolah. Temuan ini memperlihatkan bahwa *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Ketika sanksi tidak konsisten, *belief* siswa terhadap aturan melemah; ketika *belief* melemah, *attachment* terhadap guru dan sekolah ikut terdampak; ketika risiko pelanggaran dianggap rendah, *commitment* terhadap identitas sebagai siswa disiplin menjadi kurang kuat; dan ketika kegiatan sekolah tidak cukup mengikat siswa, *involvement* dalam aktivitas positif juga menurun.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberi beberapa implikasi bagi sekolah. Pertama, sekolah perlu membangun sistem sanksi yang jelas, bertahap, terdokumentasi, dan diterapkan secara konsisten kepada semua siswa tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi. Kedua, sekolah dan yayasan perlu menyepakati batas kewenangan dalam penegakan disiplin agar keputusan sanksi tidak mudah berubah karena tekanan pihak luar. Ketiga, guru BK, wali kelas, guru piket, kepala sekolah, dan yayasan perlu memiliki standar prosedur yang sama dalam menangani pelanggaran. Keempat, sekolah perlu memperkuat kegiatan positif yang melibatkan siswa, baik melalui pembelajaran yang lebih aktif, pembinaan karakter, maupun kegiatan ekstrakurikuler, sehingga *involvement* siswa terhadap sekolah meningkat. Kelima, penegakan disiplin perlu dilakukan bukan hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui pembinaan yang menjelaskan alasan moral dan sosial di balik aturan, agar *belief* siswa terhadap aturan dapat dipulihkan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian dilakukan pada satu sekolah swasta, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke semua sekolah swasta atau negeri. Kedua, aktor yang dijadikan sumber informasi belum luas cakupannya seperti pihak kepala sekolah, yayasan dan orang tua belum dilibatkan dalam penelitian ini. Ketiga, data penelitian bersifat kualitatif sehingga lebih menekankan kedalaman makna daripada pengukuran kuantitatif mengenai tingkat kedisiplinan siswa. Keempat, penelitian ini belum membandingkan secara sistematis antara siswa yang sering melanggar dan siswa yang patuh dalam hal kekuatan *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian, melibatkan pihak yayasan dan orang tua, serta menggunakan pendekatan campuran atau kuantitatif untuk melihat hubungan variabelnya.

Kesimpulan

Ketidakterdayaan institusi sekolah dalam menegakkan disiplin mewujudkan dalam tiga bentuk yang pertama adanya ketidaksesuaian simbol aturan dengan realitas di lapangan yaitu terdapat jarak yang tajam antara dokumen tata tertib tertulis dengan realitas di lapangan, di mana sanksi ringan dan berat seperti dikeluarkan dari sekolah tidak diterapkan pada pelanggaran berat. Kedua normalisasi pelanggaran yaitu terjadinya pengabaian aturan secara berulang oleh siswa seperti merokok disekolah, cabut dan terlambat karena siswa menilai melakukan pelanggaran di sekolah terasa aman dari sanksi dan dapat dinegosiasikan. Ketiga luntturnya kewibawaan pegawai sekolah ditandai dengan munculnya resistensi verbal, tidak sopan kepada guru serta hilangnya rasa takut dan hormat siswa kepada guru di sekolah. Ketidakterdayaan penegakan disiplin tersebut secara nyata disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu lemahnya konsistensi penegakan disiplin internal sekolah dalam mengeksekusi sanksi tegas. Faktor eksternal berupa dilema ekonomi sekolah swasta yang takut kehilangan murid karena ketergantungan finansial pada iuran siswa, serta adanya intervensi dari pihak yayasan dan pengaruh orang tua yang dapat melunakkan keputusan sanksi objektif. Alhasil, kegagalan disiplin ini menjadi masalah sistematis akibat ketidakmampuan institusi dalam mengelola otoritasnya di tengah tekanan ekonomi dan intervensi pihak luar.

Deklarasi Penulis

Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi dalam penyusunan artikel, meliputi perumusan ide, pengumpulan dan analisis data, penyusunan naskah, serta revisi dan penyempurnaan artikel. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi proses penelitian maupun publikasi artikel ini.

Pendanaan

Penelitian dan penyusunan artikel ini tidak memperoleh pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

Penggunaan *Artificial Intelligence*

Dalam penyusunan artikel ini, penulis dapat menggunakan perangkat berbasis *Artificial Intelligence* (AI) secara terbatas untuk membantu penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, dan/atau penyempurnaan struktur penulisan. Seluruh isi, analisis, interpretasi, dan tanggung jawab ilmiah atas artikel tetap menjadi tanggung jawab penulis.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, A. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Cetakan 1. Makassar: CV. Syakir Media Ress.
- Arianto, A & Bambang, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing
- Dewi, A. S. K., Toni, T., & Rohana, R. (2025). Implementasi Penegakan Peraturan Tata Tertib Sekolah Terhadap Karakter Disiplin Siswa (Studi Kasus SMA Negeri 2 Bilah Hulu). *Research and Development Journal of Education*, 11(1), 106-114.
- Dulkiah, M. (2020). *Sosiologi Kriminal*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ganefo, G. (2024). *Buku Ajar Ikhtisar Pengantar Sosiologi*. Universitas Universitas Jember.
- Iman, I. (2024). *Manajemen Pendidikan Teori dan Praktik dalam Sistem Pendidikan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mustakar, M. (2024). Efektivitas Sanksi dalam Menanggulangi Pelanggaran Tata Tertib Siswa Di MTs Negeri 2 Ketapang. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13 (1), 167–76.
- Muntafiroh, M. (2011). *Buku Ajar Sosiologi Antropologi*. Galang Tanjung.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putra, O. S. (2023). Implementasi Manajemen Peserta Didik Dalam Penegakan Disiplin Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang Kota. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahmadani, M. A. (2021). Persepsi Siswa Terhadap Implementasi Peraturan Dan Sanksi Di SMA Negeri 5 Pekanbaru Tahun Ajaran 2020/2021. Universitas Islam Riau.
- Rahmayana, et al. (2023). Kebijakan Penegakan Disiplin Peserta Didik Dalam Membangun Karakter Siswa. *Jurnal ISLAMIKA*, 6(1), 80–90.
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. IAIN Parepare.
- Saraswati, P. (2018). Hubungan Persepsi Siswa Tentang Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Dengan Sikap Disiplin Siswa. *Psikovidya*, 22(1), 20-45.
- Setyaningsih, R. (2019). *Psikologi Komunikasi: suatu pengantar dalam perspektif islam*. UNIDA Gontor Press.
- Situmeang, S. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, S. 2023. *Kriminologi*. Sumatra Utara: Universitas Medan Media Press.
- Syamsuddin, S. et al. (2023). *Dasar Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Hamjah Diha.
- Warsah, W & Daheri, D. (2021). *Psikologi: suatu pengantar (edisi revisi)*. Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Wijanarko, W & Eleanora, E. (2022). *Buku Ajar Kriminologi*. Pertama. Jakarta: Madza Media.